

Persepsi Narendra Modi Dalam Kebijakan India Menarik Diri Dari Regional Comprehensive Economic Partnership Tahun 2019

Azhari¹, Haiyyu Darman Moenir², Maryam Jamillah³

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹azhari.rd02@gmail.com, ²haiyyu_darman@fisip.unand.ac.id, ³maryamjamilahmj73@gmail.com

Abstrak

The Prime Minister of India, Narendra Modi introduced the Act East Policy (AEP) which was presented at the ASEAN Summit in Myanmar, November 2014. The AEP policy is a long-term economic policy and takes advantage of its strategic position to create closer relations with countries in the Asia Pacific region. One of the ways to achieve economic growth in India is to establish various economic cooperation frameworks. However, at the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Modi determined India to withdraw from RCEP. This study aims to determine Modi's perception of India's policy of withdrawing from RCEP in 2019. This has urgency because of India's political dynamics, which initially participated in negotiations since 2012, then decided to withdraw from the RCEP agreement. To see Modi's perceptions, this study uses the framework of thinking about the relationship between perception and decision making according to Ole R. Holsti. This research is a qualitative research with an analytical descriptive approach using secondary data. Furthermore, based on the framework related to Holsti perceptions, this study found that Modi's belief system and image were not in harmony with RCEP because they were not in accordance with the belief systems that influenced Modi, namely the rejection of domestic actors, the trade balance deficit, the rejection of the Three Tier Approach proposal, nationalist Hinduism and Gandhiji Talisman and not in accordance with the image that should happen according to Modi, namely realizing Make in India and India First.

Kata Kunci: India First, Make In India, Narendra Modi, Perception, RCEP

Received Revised Published

Pendahuluan

India merupakan negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di dunia. India mengalami pertumbuhan sejak dua dekade terakhir yaitu reformasi ekonomi 1991. Pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga puncaknya pada kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Manmohan

Singh. Ekonomi India mencapai pertumbuhan 9.6% pada tahun 2006-2007. Kebijakan strategis di dalam negeri dengan melakukan industrialisasi, serta memanfaatkan potensi di bidang teknologi dan informasi. India memberlakukan kebijakan ekonomi liberal dengan membuka pasar bagi perdagangan internasional dan meminimalkan peran pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan hasil dari kepemimpinan Perdana Menteri yang berkelanjutan dari Narashima Rao hingga Mahmoan Singh. Konsistensi dalam mengusung ekonomi liberal, membawa India pada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi India menjadikan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Oleh karena itu, India dibawah kepemimpinan Manmohan Singh menyetujui untuk bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk meningkatkan hubungan dengan ASEAN. Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada saat East Asian Summit (EAS) 20 November 2012 di Phnom Penh.

For India, ASEAN has been the bridge to The East. It is also central to the evolution of a regional architecture and its different cooperative frameworks. India welcomes the launch of the Regional Comprehensive Economic Partnership negotiations and supports the Phnom Penh Declarations on The East Asia Summit Development Initiative.

Liberalisasi pasar yang dilakukan India memberikan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena pertumbuhan ekonomi mulai melambat dan pemerataan kesejahteraan belum terdistribusi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kondisi ekonomi dan sosial domestik India yang masih mengalami berbagai masalah. Menurut data United Nations Development Program (UNDP), India menempati peringkat 135 dari 187 negara dengan indeks gini 33.9 pada tahun 2013. Kesenjangan ini salah satunya disebabkan angka pengangguran yang masih tinggi, distribusi kekayaan yang belum merata, serta *politics of paralysis* (ketidakmampuan pemerintah mengatasi permasalahan) yang terjadi di akhir pemerintahan Manmohan Singh.

Isu perlambatan ekonomi, tingkat korupsi yang tinggi, dan ketimpangan sosial ekonomi menjadi topik utama dalam pemilihan Perdana Menteri India tahun 2014. Isu-isu ini menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Hal ini menyebabkan pemilihan umum 2014 diwarnai perselisihan, antara India National Congress (INC) sebagai pemimpin koalisi pemerintahan yang selama satu dekade terakhir berkuasa, dengan pemerintah oposisi yaitu Bharatiya Janata Party (BJP). Pada pemilu tahun 2014, BJP mengusung Narendra Modi (Modi) sebagai calon Perdana Menteri. Modi diusung oleh BJP dikarenakan sosoknya yang populer. Modi memenangkan pemilu Gujarat dan berhasil membawa Gujarat sebagai negara bagian terkaya di India. Gujarat menyumbang 16% dari total GDP nasional, atau penyumbang PDB terbesar nasional. Padahal pada saat yang sama, perekonomian nasional sedang mengalami perlambatan pada tahun 2012-2014. Sehingga, pada pemilihan umum 2014 dimenangkan oleh Modi yang berasal dari BJP.

Modi melakukan berbagai kebijakan nasionalis selama masa pemerintahannya. Perbedaan sudut pandang politik Modi juga terlihat jelas dari kebijakan yang dibentuknya. Modi lebih mengutamakan kepentingan nasional diatas segalanya. Hal ini ditunjukkan pada instrumen kebijakan politik luar negerinya yaitu "*India First*". Kerja sama dengan kawasan Asia Pasifik menjadi prioritas kebijakan luar negeri India. Pada tahun 2014, Perdana Menteri India, Narendra Modi memperkenalkan *Act East Policy* (AEP) yang disampaikan pada ASEAN Summit di Myanmar, November 2014. AEP merupakan sebuah kebijakan ekonomi jangka panjang dan memanfaatkan posisi strategis untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan negara kawasan di Asia Pasifik.

Salah satu prioritas Modi dalam AEP yaitu bergabungnya India dalam RCEP. RCEP pertama kali diluncurkan pada EAS di Phnom Penh, Kamboja pada November 2012. Peluncuran RCEP untuk membentuk perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif dan saling menguntungkan antara negara ASEAN dengan mitra FTA ASEAN (Australia, Tiongkok, India, Japan, New Zealand and

South Korea). Berdasarkan *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP*, perundingan RCEP resmi dimulai oleh anggota RCEP pada tahun 2013.

India terus berperan aktif dalam negosiasi RCEP. Dalam negosiasi ini, India mengusulkan proposal “*Three tier approach*” untuk meliberalisasi tarif berdasarkan *Free Trade Agreement* (FTA) yang sudah dimiliki India dengan beberapa anggota RCEP. *Three tier approach* adalah program penurunan tarif oleh India dengan tiga tingkatan pengurangan tarif berdasarkan pada hubungan kerja sama yang telah dimiliki India dengan anggota RCEP. Tujuan dari proposal ini yaitu untuk mengurangi impor barang-barang murah dari Tiongkok, serta terbukanya India sebagai pasar jasa dari Tiongkok. India merasa terancam karena daya saing ekonomi masih rendah dibandingkan Tiongkok dan negara-negara RCEP lainnya. Namun proposal ini ditolak oleh negara RCEP karena akan merugikan negara yang tidak memiliki kerja sama dengan India dan ini merupakan bentuk proteksionisme dalam perdagangan.

Pada 4 November 2019 saat KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) RCEP di Bangkok, PM Modi mengumumkan bahwa India menarik diri dari RCEP. Dilansir dari pidatonya melalui *Economic Times*,

“When I measure the RCEP agreement with respect to the interests of Indians, I do not get a positive answer. Therefore, neither the talisman of Gandhiji nor my own conscience permits me to join RCEP”.

Dari sini dapat dilihat bahwa Modi memiliki peran dalam kebijakan India menarik diri dari RCEP berdasarkan kepercayaan nasionalis hindunya ditambah kepribadian Modi kuat dan tegas serta ajaran *Gandhiji Talisman* yang menjadi pegangan Modi. Modi percaya bahwa RCEP hanya akan memperburuk kesengsaraan ekonomi India dan tidak selaras dengan ideologi dari BJP.

Dalam melihat kasus mundurnya India dari RCEP, dapat dilihat bahwa Modi memiliki persepsi tersendiri terhadap RCEP sehingga menarik untuk diteliti. Pertama, Modi mengesampingkan gagasan AEP yang diinisiasi bahkan

keberhasilan dari prioritas tersebut bergabung RCEP. Kedua, Modi juga mengesampingkan integrasi *mega trade* di ASEAN yang bisa dimanfaatkan India untuk memperluas akses pasar. Tetapi, Narendra Modi melakukan proteksi perekonomian negara, kebijakan tersebut menunjukkan hal yang berlawanan dari tujuan AEP. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana persepsi Modi memutuskan India menarik diri dari RCEP.

Metode

Dalam penelitian ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dipilih untuk memfokuskan pemahaman mengenai bagaimana persepsi Modi berkorelasi dengan proses kebijakan India dalam kasus mundurnya India dari RCEP. Agar penelitian ini tetap berpijak pada tumpuan dan fokus utamanya, maka penulis menetapkan batasan bagi penelitian ini yakni tahun 2014-2019. Tahun 2014 dipilih sebagai awal permulaan karena pada tahun tersebut Modi mulai menjabat sebagai perdana menteri India dan 4 November 2019 saat KTT RCEP di Bangkok, PM Modi mengumumkan bahwa India menarik diri dari RCEP. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari sumber-sumber literatur akademik seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita dan website terkait RCEP untuk mendapatkan informasi keterlibatan Narendra Modi di RCEP dan mundurnya India dari RCEP terutama pengaruh persepsi Narendra dalam putusan untuk mundur dari RCEP. Disini, sumber yang dijadikan bahan rujukan utama bagi penulis adalah biografi, buku, jurnal ilmiah, teks pidato, berita dan juga website resmi yang dipublikasikan oleh National Portal of India (www.india.gov.in), South Asian Studies, South Asia Research oleh SAGE Journals, South Asia: Journal of South Asian Studies oleh Routledge, dan Strategic Studies.

Hasil dan Pembahasan

Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Modi dalam menarik India dari RCEP, merupakan pijakan awal penelitian ini melihat pada konsep persepsi. Persepsi dapat hadir dan terbentuk oleh pengalaman individu dalam jangka waktu yang lama sehingga pengalaman tersebut membentuk kepercayaan tersendiri yang kemudian mempengaruhi cara pandang individu dalam melihat sebuah persoalan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan bagaimana persepsi Modi sebagai individu dalam menentukan kebijakan India keluar dari RCEP pada tahun 2019.

Sistem Keyakinan (*Belief System*) menurut Narendra Modi

Kebijakan India menarik diri dari RCEP merupakan salah satu kebijakan yang mencerminkan keterlibatan sistem keyakinan Narendra Modi dalam pengambilan kebijakan. Tepat pada tanggal 4 November 2019, Pemerintah India resmi menetapkan diri keluar dari RCEP. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perekonomian negara dan khawatir akan banjirnya produk-produk dari luar negeri terutama Tiongkok. Kemudian, dengan tidak terlibat dalam RCEP sebagai bentuk mencapai tujuan “*Make in India*”.

Pertama, input informasi berasal dari pengalaman dalam kehidupannya yang membentuk persepsi Modi. Semasa kecilnya Modi sudah tergabung dalam organisasi sejak usianya delapan tahun. Modi kecil pada masa sekolahnya bergabung dengan organisasi National Cadet Corps (NCC), yang merupakan wadah baginya untuk membentuk nasionalisme dan patriotismenya. Menurut Modi, NCC bukan hanya membentuk patriotisme, namun juga tempat untuk memahami India lebih baik. Namun, organisasi yang sangat berperan dalam mempengaruhi karakter dan pandangan politiknya adalah Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) di mana ia telah bergabung sejak usia delapan tahun. Menjadi relawan RSS membuat anak tak bisa manja karena anggota RSS menjalankan prinsip “dedikasi dan kerja keras” dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa mereka ditakdirkan berbeda bahkan dalam tulang dan darahnya. Saat remaja, Modi bahkan sempat berpikir untuk menjadi seorang

pertapa dan saat itu Modi tetap mengikuti ajaran tradisional yang menekankan pada tindakan menahan diri dan melayani orang lain. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa organisasi yang diikutinya sangat berdampak terhadap pembentukan keyakinan pada Modi.

Narendra Modi menjadi Perdana Menteri tidak terlepas dari peran partai politiknya yaitu Bharatiya Janata Party (BJP). Maka dari itu perlunya melihat ideologi partai BJP ini dalam menggambarkan persepsi Modi karena Modi telah lama bergabung ke dalam BJP sehingga nilai-nilai yang ada di BJP akan mempengaruhi Modi dalam pengambilan keputusan. Modi telah bergabung ke dalam RSS sejak umur delapan tahun yang mana RSS ini merupakan partai sayap dari BJP, Modi resmi bergabung dalam BJP ini sejak 1987. BJP merupakan partai yang menganut ideologi Hindutva, sebuah ideologi yang mendefinisikan budaya India dalam kaitannya dengan nilai-nilai Hindu, dan percaya bahwa India merupakan tanah Hindu. Dari sinilah sistem keyakinan Modi memiliki nilai nasionalisme hindu dalam bertindak dalam setiap kebijakan. BJP memiliki pandangan terhadap kebijakan ekonomi domestik, yaitu *Swadeshi* (ekonomi nasionalisme). *Swadeshi* secara makna adalah domestik, dalam negeri atau milik negara sendiri. Sehingga hal ini digunakan oleh hindu nasionalis dalam penetapan kebijakan. Bagi BJP, *swadeshi* diartikan sebagai *India First* yang mana konsep ini diartikan BJP sebagai sumber daya dalam negeri untuk pengembangan kepentingan nasional dan manfaatnya harus mengalir ke masyarakat. Oleh karena ini, Modi mengaku bahwa dirinya sebagai hindu nasionalis yang selalu menempatkan posisi "*India First*".

Berdasarkan organisasi yang telah Modi ikuti tersebut membentuk persepsi Modi terhadap RCEP bahwa tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasinya. Sebagai seorang hindu nasionalis Modi mengedepankan kepentingan nasionalnya untuk meningkatkan perekonomian dengan melakukan proteksionisme agar produk murah tidak masuk ke pasar domestik. Oleh karena itu, keputusan Modi menarik diri dari keterlibatan RCEP karena akan membuka pasar domestik bagi produk murah dari negara anggota RCEP.

Kedua, input informasi selanjutnya yang membentuk sistem keyakinan Modi yaitu dinamika domestik terhadap adanya RCEP di India. Kelompok kepentingan yang melakukan penolakan atas RCEP, yaitu berasal dari kelompok bisnis, asosiasi pertanian dan peternakan, dan sayap partai. Kelompok bisnis, yaitu berasal dari kelompok bisnis, petani dan sayap partai. Kelompok bisnis berasal dari Confederation of Indian Industry (CII) yang memberikan respon terhadap pemerintah yaitu CII menganggap bahwa mundurnya India dari perundingan RCEP dianggap dapat menghambat integrasi India dalam GVC terutama di tengah momentum perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, sehingga menghambat investasi dan *preferential access* bagi produk ekspor India untuk dapat dijual ke luar negeri. Melalui CII tampak bahwa RCEP memiliki manfaat terhadap sektor investasi. Sehingga hal ini akan menjadi input informasi dalam penetapan suatu kebijakan.

Selanjutnya, berasal dari asosiasi pertanian dan peternakan yang menjadi input informasi dalam pembentukan suatu kebijakan. Salah satu organisasi masyarakat yang menentang keras keterlibatan India dalam perjanjian RCEP ialah Karnataka Rajya Raitha Sangha (KRSS), serikat petani terbesar di India yang umumnya berbasis di wilayah India Selatan. Pada bulan April 2017, K. T. Gangdhar sebagai ketua dari KRSS menyatakan bahwa bergabungnya India dalam RCEP akan semakin memperparah dampak bagi petani dalam negeri terutama pada sektor kelapa sawit, teh dan lada setelah bergabungnya India dalam FTA antara ASEAN dengan Sri Lanka. Dalam pernyataan tersebut, terdapat pula kritik mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam rancangan RCEP yang dianggap merugikan dan menghambat petani untuk mengembangkan variasi jenis bijih yang berakibat pada petani untuk terpaksa membeli bibit dari korporasi besar yang berbiaya tinggi.

Penolakan juga berasal dari kelompok All-India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC) turut menganggap bahwa RCEP akan mencabut seluruh hak petani dalam kendali biji-biji pertanian serta menganggap seluruh proses perundingan yang dianggap tidak demokratis,

transparan, serta hanya menguntungkan korporasi besar terutama menyangkut hak kekayaan intelektual dalam industri farmasi dan keamanan data digital. Sebagai salah satu serikat utama di India yang menaungi lebih dari 250 organisasi pertanian dan peternakan di India, AIKSCC bersama dengan sayap pemuda dari INC melakukan demonstrasi dalam menentang bergabungnya India dalam RCEP. Berdasarkan sikap dari KRSS dan AIKSCC yang mendapat dukungan dari INC, dapat dilihat bahwa RCEP diyakini hanya akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian India terkhusus sektor pertanian dan peternakan.

Kuatnya kelompok nasionalis Hindu sebagai salah satu basis dukungan utama bagi Perdana Menteri Narendra Modi dapat terlihat dalam demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah di negara-negara bagian India yang menentang keterlibatan India dalam RCEP. Pada tanggal 10 Oktober 2019, RSS melakukan demonstrasi di New Delhi selama sebelas hari yang dianggap dapat merugikan seratus juta pekerja dalam sektor pertanian dan susu di India dengan kekhawatiran tidak mampu berkompetisi dengan produsen asing. Demonstrasi massal selama sepuluh hari yang dilakukan oleh SJM dan RSS menganggap bahwa RCEP merugikan daya tawar India dalam perdagangan internasional dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar jika India secara tergesa-gesa memaksakan integrasi ekonominya ke dalam GVC. Selain itu, posisi SJM dalam memandang perdagangan elektronik (*e-commerce*) cenderung merugikan pengusaha kecil dan menengah di India yang dianggap dapat mendorong masuknya barang bebas cukai, terutama dari Tiongkok dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat melalui Jepang, seperti yang dituturkan oleh salah satu petinggi RSS, Ashwani Mahajan.

Dinamika domestik ini menjadi bagian yang signifikan dalam input informasi dalam realitas masa sekarang bagi Modi. Tuntutan yang datang selama satu tahun terakhir ketika RCEP akan diselesaikan perundingannya, aksi protes ini menjadi bahan pertimbangan Modi dalam penentuan kebijakan India terhadap RCEP. Pada akhirnya Modi meyakini bahwa RCEP tidak memberikan

keuntungan kepada India dari segi perekonomian dan hanya akan memberikan kerugian serta berdampak buruk terhadap masyarakat. Modi selalu menempatkan *India First* pada setiap kebijakan pemerintahan, protes yang dilakukan aktor domestik merupakan kepentingan India yang harus diperjuangkan. Pada akhirnya tepat tanggal 4 November 2019 saat RCEP Summit, Modi menyatakan India menarik diri dari kerangka kerja sama RCEP. hal ini ia sampaikan dengan menyatakan bahwa:

When I measure the RCEP Agreement with respect to the interests of all Indians, I do not get a positive answer. Therefore, neither the talisman of Gandhiji nor my own conscience permit me to join RCEP,”

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa RCEP tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan keyakinan modi yaitu *Gandhiji Talisman*. Melalui ajaran *Ghandiji Talisman* ini menunjukkan pentingnya sesuatu yang dilakukan memiliki kebermanfaatan terhadap orang lain. Ajaran ini menjadi keyakinan Modi dalam memutuskan India menarik diri dari RCEP. Berdasarkan ajaran tersebut RCEP tidak akan memberi manfaat untuk India melainkan hanya akan mendatangkan kesengsaraan kepada masyarakat.

Ketiga, input informasi selanjutnya yaitu defisit neraca perdagangan dari negara RCEP yang dikhawatirkan akan menyebabkan defisit pada tahun-tahun selanjutnya. Defisit neraca perdagangan ini terutama berasal dari Tiongkok yang mana akan menyebabkan banjirnya produk murah di pasar domestik India. Hubungan Tiongkok dan India merupakan hubungan yang pragmatis. Melalui hubungan yang dibangun oleh Modi dengan memposisikan Tiongkok sebagai negara prioritas dalam menjalin kerja sama. Namun, ketika hubungan tersebut tidak mendatangkan keuntungan maka Modi akan meninggalkannya. Dari hal ini, menunjukkan bahwa defisit neraca perdagangan India yang dihadapi telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dengan negara anggota RCEP secara hubungan bilateral. Hubungan dengan negara anggota RCEP sebelumnya dilakukan secara bilateral telah mengalami defisit sehingga untuk

mengantisipasi kerugian secara multilateral Modi memutuskan untuk tidak terlibat dengan anggota RCEP. Oleh karena itu, Modi memiliki tujuan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan secara multilateral dengan menarik diri dari RCEP.

Keempat, input informasi selanjutnya yang membentuk sistem keyakinan yaitu ketika proses perundingan RCEP. India mengajukan proposal *Three Tier Approach* pada 2015 untuk meliberalisasi tarif berdasarkan *Free Trade Agreement* (FTA) yang sudah dimiliki India dengan beberapa anggota RCEP. *Three-tier approach* adalah program penurunan tarif oleh India dengan tiga tingkatan pengurangan tarif berdasarkan pada hubungan kerja sama yang telah dimiliki India dengan anggota RCEP. Anggota RCEP tidak menyukai sikap India yang proteksionisme mengacu pada Industri domestik. Sikap India yang proteksionisme ini menjadi salah satu faktor tertundanya negosiasi dan membuat negosiasi tidak bisa diselesaikan pada akhir 2015.

Perdebatan terjadi pada setiap putaran negosiasi RCEP namun perdebatan paling panjang terjadi pada putaran ke 13 yang diadakan di Auckland, Selandia baru. Diawali dengan Tiongkok yang menuntut penurunan tarif yang lebih besar dan menentang proposal *Three Tier Approach*. Hal ini juga mendorong anggota ASEAN, Laos dan Kamboja untuk ikut menentang dan kemudian diikuti oleh Malaysia dan Indonesia. Negosiasi pada putaran ini tidak mencapai kesepakatan untuk *Three Tier Approach* karena India tidak bersedia merubah proposal *Three Tier Approach*. Alasan India tidak merubah proposal ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu India dalam perjanjian perdagangan yang telah diikuti India di mana India tidak mendapat banyak keuntungan seperti defisit neraca perdagangan dengan sebagian besar mitra FTA-nya. Dari pengajuan proposal tersebut India telah mengupayakan untuk mencapai kepentingannya namun tidak disambut baik oleh anggota RCEP.

Dari penjelasan di atas terdapat berbagai input informasi yang membentuk persepsi yang terdiri dari nilai dan sistem keyakinan. Pertama, nilai yang berasal dari ideologi partai dan organisasi Modi yang telah ia ikuti selama

masa hidupnya. Kedua, keyakinan Modi terhadap ajaran yang dipegangnya dan disampaikan pada saat mengundurkan diri dari perundingan RCEP yaitu *Gandhiji Talisman*. Kemudian yang dihadapi oleh Modi yaitu dinamika domestik, defisit neraca perdagangan dan ditolaknya proposal *Three Tier Approach* oleh negara RCEP. Berdasarkan hal tersebut akan membentuk persepsi Modi pada akhirnya memutuskan India menarik diri dari RCEP.

Citra yang Seharusnya Terjadi (Nilai) Menurut Narendra Modi

Perekonomian India mulai mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir dari 2012-2014. Oleh karena hal tersebut, India berupaya untuk meningkatkan kembali perekonomiannya. Hal ini menjadi semakin menarik di saat India memilih pemimpin barunya yaitu Narendra Modi yang Hindu nasionalis. Modi bersama BJP menjanjikan penguatan Hindu nasionalisme dan pembangunan ekonomi. Ia memfokuskan janji kampanye pada pemilu nasional tentang pemberantasan korupsi, peningkatan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Dia mengklaim dirinya sebagai bapak pembangunan karena bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tanpa fokus pada salah satu sektor.

Modi melakukan berbagai kebijakan nasionalis selama masa pemerintahannya yang pertama. Modi lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya. Hal ini ditunjukkan pada instrumen Kebijakan Politik Luar Negerinya yaitu "*India First*" yang mana setiap warga negaranya harus memprioritaskan India dalam setiap kebijakannya. Melalui kebijakan *India First* Modi mengedepankan kepentingan domestik atau kepentingan nasional dalam kebijakannya. Melalui kebijakan tersebut terlihat bahwa setiap kebijakan harus sesuai dengan kepentingan India. Oleh karena itu, pada kerja sama RCEP terdapat kepentingan yang ingin dicapai Modi bagi India namun tidak tercapai sehingga secara langsung membentuk persepsi Modi terhadap RCEP tidak sesuai dengan kepentingannya. Maka dari itu, Modi menetapkan keputusan untuk menarik India dari RCEP yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional India.

Pada masa Pemerintahan Modi mengusung jargon “*Make In India*” sebagai upaya untuk memajukan perekonomian negara. Pembangunan sudah tampak dari Modi menjabat sebagai Menteri Gujarat yang selalu mengupayakan dan mengembangkan perekonomian wilayah tersebut terutama pertanian. Selama menjabat sebagai kepala pemerintahan Gujarat, Modi membangun reputasi yang tangguh sebagai administrator yang pandai. Modi terkenal mampu menyederhanakan sistem birokrasi pemerintah dan membuatnya menjadi lebih tanggap dan efisien. Model pemerintahan Modi dikenal dengan sebutan *Pro People Good Governance Model* yaitu model pemerintahan yang bersih dan pro rakyat dan kini lebih dikenal dengan *Gujarat Model*. Modi diberi penghargaan atas pertumbuhan ekonomi yang cepat di Gujarat. Semenjak terpilih sebagai *Chief Minister* atau kepala eksekutif di tahun 2002, Modi fokus pada pertumbuhan ekonomi di Gujarat dengan membuatnya sebagai tujuan yang atraktif untuk para pebisnis dan industrialisasi. Pada masa pemerintahannya tahun 2007, Modi meningkatkan pertumbuhan pertanian, menyediakan listrik untuk semua desa, dan memperkuat perkembangan infrastruktur secara cepat di negara bagian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka citra yang seharusnya terjadi menurut Modi adalah India melalui *Make in India* mampu menjadi negara *manufacture hub* yang dapat meningkatkan produksi manufakturnya sendiri dibandingkan melakukan impor. Dalam mengurangi komoditas impor, perlu memindahkan produksi manufaktur ke dalam negeri. Hal ini merupakan adalah target utama poin ketiga dalam skema *Make in India*. Untuk meningkatkan produksi dalam negeri, pemerintah India menyiapkan beberapa insentif kepada para pengusaha domestik, seperti subsidi ekspor, skema dukungan finansial, dan mewajibkan perusahaan asing untuk memuat kandungan lokal. Oleh karena itu, ketika India terlibat dalam perundingan RCEP India mengusulkan proposal *Three Tier Approach* sebagai bentuk mengurangi impor dan membangun manufaktur dalam negeri dalam mencapai tujuan dari *Make in India*. Namun, pengusulan proposal tersebut ditolak oleh negara anggota RCEP

maka dari itu Modi memutuskan India untuk menarik diri dari RCEP yang dianggap tidak dapat mencapai tujuan dari *Make in India* dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi India.

Kebijakan yang dikeluarkan Modi pada saat dirinya terpilih menjadi Perdana Menteri India salah satunya yaitu *Act East Policy*. Tujuan dari kebijakan ini yaitu meningkatkan perekonomian melalui konektivitas antar negara di kawasan ASEAN. Dalam kebijakan ini terdapat salah satu prioritasnya adalah RCEP. Namun, pada akhir tahun 2019 Modi memutuskan kebijakan India untuk menarik diri dari RCEP. Berdasarkan keputusan ini menunjukkan bahwa tujuan dari mundurnya India dikarenakan tidak dapat menguntungkan bagi Modi. Sehingga kebijakan *Act East Policy* yang tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian namun hal tersebut tidak bisa dicapai melalui kerjasama di RCEP. maka dari itu Modi menarik India dari RCEP tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas pada penelitian ini menemukan bahwa dalam sistem keyakinan terdapat persepsi tentang realitas individu dapat dihasilkan melalui citra yang seharusnya terjadi. Persepsi merupakan hasil dari hubungan tidak langsung antara sistem keyakinan dengan pengambilan keputusan, dimana sebelumnya terdapat pengolahan informasi yang diterima oleh individu. Penulis melihat bahwa persepsi Modi terhadap keputusan India menarik diri dari RCEP berkaitan dengan sistem keyakinan dan citra yang seharusnya terjadi menurut Modi. Berdasarkan input informasi tersebut dapat membentuk persepsi dalam penetapan keputusan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Modi. Maka dari itu, melalui input informasi dapat dilihat bahwa tujuan utama dari kebijakan Modi adalah melindungi perekonomian India. Hal tersebut terlihat melalui pernyataan Modi bahwa RCEP tidak sesuai dengan ajaran *Gandhiji Talisman* yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat India. Oleh karena itu, input informasi inilah yang membentuk persepsi Modi yang negatif terhadap keberadaan RCEP karena dapat merugikan perekonomian India.

Kesimpulan

Persepsi Narendra Modi dalam kebijakan India menarik diri dari RCEP 2019 dianalisis menggunakan kerangka pemikiran Ole R. Holsti. Pertama, informasi-informasi sebagai input bagi sistem keyakinan Modi terdiri atas sejarah kehidupannya, pergolakan domestik, prioritas kebijakan ekonomi serta neraca defisit perdagangan. Input informasi yang terdiri dari situasi tertentu dapat membentuk sistem keyakinan. India sedang dihadapi persoalan ketika ingin bergabung kedalam perjanjian RCEP, berbagai persoalan dari level domestik bahkan internasional. Citra Modi dalam menjabat yaitu ingin mewujudkan India yang berdasarkan hindu nasionalisme untuk fokus terhadap kebijakan politik domestik. Kemudian, citra masa sekarang yang dihadapi modi dalam mewujudkan hal ini dipengaruhi oleh berbagai persoalan yang muncul, seperti pergolakan kelompok kepentingan dan bertolak belakang dengan *Gandhiji Talisman* untuk tidak bergabung di RCEP.

Melalui input informasi yang berasal dari situasi yang dihadapi oleh Modi mempengaruhi pembentukan persepsi Modi terhadap RCEP yang tidak sesuai dengan sistem keyakinan dan citra. Input informasi yang membentuk sistem keyakinan dan mempengaruhi persepsi Modi yaitu penolakan dari aktor domestik terhadap RCEP, defisit neraca perdagangan terhadap negara anggota RCEP, penolakan proposal *Three tier approach*, hindu nasionalis dan *Gandhiji Talisman*. Kemudian, tidak sesuai dengan citra yang seharusnya terjadi menurut Modi yaitu untuk mewujudkan *Make in India* dan *India First*.

Daftar Pustaka

Abraham Hugo Pandu Wicaksono, "India's Withdrawal from Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)," *Nation State: Journal of International Studies* 4, no. 2 (2021): 231–246.

Amitendu Pailit. 2016. *India inches towards liberalisation at RCEP*. *East Asia Forum*. Diakses melalui <https://www.eastasiaforum.org/2016/09/30/india-inches-towards-liberalisation-at-rcep/>

Amitendu Palit, *Domestic Politics Force India 's Withdrawal from RCEP and Broader Trade Disengagement*, *East-West Center*, 2019.

Amitendu Palit, "India & RCEP: Will Flexibility on Tariffs Get Access in Services?," *South Asia*, no. 51 (2008): 1–5. Diakses melalui <https://www.isas.nus.edu.sg/papers/444-india-rcep-will-flexibility-on-tariffs-get-access-in-services/>

Amitendu Palit and Asian Studies, *Economics in Narendra Modi 's Foreign Policy* (Center for Asian Studies, 2015).

Amith Shah, "View: By saying no to RCEP, PM Narendra Modi has kept India first", *Economic Times*, Nov 13, 2019.

Andy Marino, "Narendra Modi – A Political Biography". Vol X, no. 1 (2015): 310.

Arijit Mazumdar, "From 'Look East' To 'Act East': India'S Evolving Engagement With the Asia-Pacific Region," *Asian Affairs* 52, no. 2 (2021): 357–374